

Katalog: 2102041.12

POTRET SENSUS PENDUDUK 2020

PROVINSI SUMATERA UTARA



MENUJU
SATU DATA
KEPENDUDUKAN
INDONESIA

 Sensus
Penduduk
2020
#MencatatIndonesia

 SATU DATA
INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

**Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sumatera Utara
Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia**

ISBN : 978-602-331-111-8

No. Publikasi: 12000.2104

Katalog: 2102041.12

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm Jumlah

Halaman: vi + 21 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Penyunting Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123 Telp. 061-8452343 Faks. 061-8452773

Bulan Januari 2021

Dicetak Oleh:

CV. Rabbani

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

POTRET SENSUS PENDUDUK 2020

PROVINSI SUMATERA UTARA



MENUJU
SATU DATA
KEPENDUDUKAN
INDONESIA



Sensus
Penduduk
2020
#MencatatIndonesia

SATU DATA
INDONESIA



Kegiatan Supervisi Penjaminan Kualitas (PK) SP2020 di Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada September 2020

- **Perjalanan Sensus Penduduk 2020**
 - **Sensus Penduduk Online**
 - **Penduduk Sumatera Utara**
- Hasil Sensus Penduduk 2020**
- **Tabel-Tabel**

1 Data yang valid merupakan **kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara** karena data yang akurat sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar. Data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Data yang akurat sangat penting untuk mengeksekusi program yang tepat sasaran.

2 Kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai **Kementerian dan Lembaga** menjadi salah **satu penyebab** tidak optimalnya **pelaksanaan kebijakan pemerintah**.

3 **Kolaborasi antarlembaga** dan **meninggalkan ego sektoral**.

Presiden Joko Widodo

1. Penganjangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara pada tanggal 24 Januari 2020
2. Peresmian Pembukaan Rakortek SE2016 di Istana Negara, 2016
3. Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019



Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Sumatera Utara adalah provinsi dengan potensi yang sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dengan strategi yang tepat, penduduk dapat menjadi kekuatan bangsa untuk Indonesia Maju. Demi mewujudkan cita-cita Indonesia Maju, BPS berikhtiar menyelesaikan amanat untuk melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19. Atas seijin Tuhan Yang Maha Kuasa disertai dengan kerja keras seluruh pihak, pendataan lapangan SP2020 di Sumatera Utara telah selesai dilaksanakan dengan berbagai penyesuaian tata kelola di setiap tahapannya dan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020.

Meskipun SP2020 dilaksanakan di tengah pandemi, namun terdapat beberapa inovasi yang diterapkan dimana salah satunya adalah penggunaan metode kombinasi yang baru pertama kali diterapkan dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia. Metode kombinasi adalah penggunaan data administrasi kependudukan (adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

Selangkah lebih dekat menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, BPS bersama Ditjen Dukcapil merilis hasil SP2020. Perjalanan pelaksanaan dan hasil SP2020 disajikan secara ringkas dalam *booklet Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sumatera Utara Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*.

Booklet ini menyajikan agregat data dasar penduduk Sumatera Utara sampai dengan level kabupaten/kota. Cakupan data dasar dari angka hasil SP2020 adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi, berikut parameter-parameter turunannya seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan laju pertumbuhan penduduk. Data-data tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan serta berbagai referensi penelitian.

Booklet ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga *booklet* ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak untuk berbagai kepentingan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan sensus penduduk di masa yang akan datang.



Medan, Januari 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara


Dr. Syech Suhaimi

Dr. Syech Suhaimi, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara



1

Perjalanan Sensus Penduduk 2020

SP2020, titik awal *roadmap*
Satu Data Kependudukan Indonesia.
#MencatatIndonesia

Petugas SP2020 Siap Mencatat Indonesia



Mencatat Indonesia: Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia

Data penduduk merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena data penduduk digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran, parameter untuk menentukan kebijakan, dan eksekusi program pembangunan.

Namun data penduduk merupakan salah satu jenis data yang berpotensi untuk berbeda. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan referensi waktu, konsep-definisi, termasuk perbedaan metodologi pengumpulan data. Dalam hal ini Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi berbagai perbedaan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan titik awal dalam *roadmap* mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, melalui integrasi data administrasi kependudukan sebagai basis data pelaksanaan SP2020.

Data kependudukan dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih baik

2024

Data kependudukan yang reliabel membuka akses lebih luas pada layanan publik

Perbaikan mekanisme pemutakhiran data kependudukan

ROADMAP SATU DATA KEPENDUDUKAN
Sumber: Kemen-PPN/Sapenas (2019)

Integrasi data kependudukan dalam SIAK dengan Sensus Penduduk

Sistem informasi desa/kelurahan yang terhubung ke basis data kependudukan

Masyarakat terlibat aktif dalam peningkatan kualitas data kependudukan

Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Tujuan Pelaksanaan SP2020



Melalui pendataan lengkap di tahun 2020, SP2020 bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju **"SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA"**.

Melalui pendataan sampel di tahun 2021, SP2020 bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya untuk kepentingan penghitungan proyeksi penduduk, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan monitoring pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Gambaran Pelaksanaan SP2020

1. SP2020 bertujuan untuk mencatat Indonesia dengan menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data Administrasi Kependudukan (Adminduk).
2. SP2020 mencatat WNI dan WNA yang telah tinggal di wilayah teritorial Indonesia minimal 1 tahun atau berniat untuk menetap di Indonesia minimal 1 tahun, termasuk perwakilan RI yang ada di luar negeri/ wilayah teritorial Indonesia beserta keluarganya.
3. Pencatatan penduduk dalam SP2020 dilaksanakan di wilayah penduduk biasanya bertempat tinggal berdasarkan konsep kependudukan dengan referensi waktu minimal 1 tahun.
4. SP2020 mencatat Indonesia dengan berbagai moda, yaitu *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI) dalam SP Online, serta *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI) dan *Drop Off and Pick Up* (DOPU) dalam SP September.
5. Periode pendataan penduduk adalah 15 Februari - 29 Mei 2020 (SP Online) dan September 2020 (pendataan lapangan) .



DASAR PENYELENGGARAAN

Penduduk adalah kekuatan sebuah negara. Jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk semua kebijakan negara. Sehingga UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP No. 51 Tahun 1999 mengamanahkan Badan Pusat Statistik untuk menghitung kekuatan tersebut melalui sensus penduduk. Pencatatan penduduk juga diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 dan perubahannya pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta oleh UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan agar semua negara memiliki statistik kependudukan dan perumahan setidaknya sekali dalam periode 2015-2024. PBB juga menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (*full canvassing*) menuju ke *register based census*. Dalam perjalanannya menuju ke *fully register based census*, sensus penduduk dapat dilaksanakan dengan metode kombinasi dahulu yaitu mengkombinasikan data registrasi dengan data sensus. Keuntungan metode ini adalah meningkatkan keakuratan data; saling melengkapi kedua sumber data; memeriksa, memutakhirkan, dan meningkatkan kualitas kedua sumber data; menjadi bingkai penghubung untuk menyatukan berbagai sumber data.

Oleh karena itu, SP2020 dirancang dengan menggunakan data adminduk dari Ditjen Dukcapil sebagai data dasar. Hal ini juga dimaksudkan agar SP2020 menjadi *bridging* untuk mewujudkan Satu Kependudukan Indonesia.

Upaya mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia juga diperkuat oleh Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Perpres ini mengatur kebijakan tata kelola data pemerintah, termasuk data kependudukan. Data dikelola agar dapat dibagipakaikan antar-instansi pemerintah dengan memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah bekerja sama untuk membangun satu data yang terintegrasi secara utuh tentang Indonesia. Lebih lanjut, setiap instansi pemerintah akan menghasilkan data yang selaras.

Sinkronisasi data juga dilandasi oleh Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKSPH). Perpres ini bertujuan untuk percepatan pencatatan seluruh peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain-lain. Sehingga setiap penduduk dapat memiliki dokumen kependudukan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan. Pencatatan peristiwa tersebut dan hasil SP2020 merupakan sumber data untuk penghitungan Statistik Hayati.

Dalam hal ini, SP2020 menjadi sebuah titik awal dalam pengembangan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Sehingga SP2020 dapat menjadi bingkai penghubung untuk integrasi data dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.



UU No. 16 Tahun 1997

tentang Statistik

UU No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan

UU No. 52 Tahun 2009

Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga

UU No. 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan



United Nations

Recommendation 2017

Perpres No. 39 Tahun 2019



Satu Data Indonesia

Perpres No. 39 Tahun 2019



Statistik Hayati

Perpres No. 62 Tahun 2019

METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, SP2020 menggunakan metode kombinasi yang merupakan titik peralihan pelaksanaan sensus dari metode tradisional (mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah) menjadi sensus penduduk yang terintegrasi dengan data registrasi, yaitu data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

Metode Pelaksanaan SP2020



Sumber: UN (2017). *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses Revision 3*.

Tahapan Pelaksanaan SP2020



15 Feb – 29 Mei 2020

Penduduk melaksanakan sensus penduduk secara mandiri melalui: sensus.bps.go.id.

Informasi keberadaan penduduk yang melakukan SP Online dimutakhirkan kembali pada September 2020.



September 2020

- ▶ Pemeriksaan daftar penduduk.
- ▶ Verifikasi lapangan (*ground check*)
- ▶ Pendataan penduduk (DOPU, Non DOPU, Wawancara)



2021: PENCACAHAN SAMPEL

Pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya.

KONSEP DALAM SENSUS PENDUDUK 2020

Sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, SP2020 menggunakan konsep penduduk, keluarga, dan wilayah kerja statistik yang diselaraskan dengan konsep yang digunakan pada data Adminduk Ditjen Dukcapil. Dasar penyelarasan konsep pada SP2020 mengacu pada Undang-undang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Rekomendasi PBB tentang Sensus Penduduk dan Perumahan.

1

Konsep Penduduk

Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Namun, SP2020 menggunakan referensi waktu 12 bulan. Perubahan ini didasari oleh:

- ◆ UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15: penduduk yang sudah pindah minimal 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah.
- ◆ *System of National Account (SNA)*: Penduduk adalah mereka yang telah menetap dan berniat menetap minimal 1 tahun di wilayah Indonesia.
- ◆ *United Nations Statistics Division (UNSD)* merekomendasikan agar negara-negara menerapkan batasan 12 bulan untuk tempat biasa tinggal.

2

Konsep Rumah Tangga dan Keluarga

- ◆ Pada sensus penduduk sebelumnya, unit pencacahan yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk menggunakan pendekatan rumah tangga, sedangkan SP2020 menggunakan pendekatan keluarga.
- ◆ Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
- ◆ Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar pada kartu keluarga (KK).

3

Wilayah Kerja Statistik

- ◆ Wilayah kerja statistik (*wilkerstat*) adalah wilayah kerja untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS. *Wilkerstat* terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus, ditambah dengan informasi satuan lingkungan setempat.
- ◆ Pada sensus penduduk sebelumnya, *wilkerstat* terkecil yang digunakan adalah blok sensus. Blok sensus memiliki muatan yang hampir seragam atau sekitar 80 rumah tangga. Blok sensus menjadi bagian dari kerangka sampel pada survei-survei yang dilakukan BPS.
- ◆ *Wilkerstat* yang digunakan pada pelaksanaan SP2020 adalah berdasarkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) seperti RT/Lingkungan/jorong/banjar/dusun dan lain sebagainya dengan muatan yang sangat beragam. Untuk kedepannya, BPS akan melakukan penyesuaian terhadap metodologi pengambilan sampel dalam pelaksanaan survei-survei yang dilakukan oleh BPS dengan menggunakan *wilkerstat* berdasarkan SLS.

TANTANGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2020

Tantangan

Pandemi COVID-19

- ▶ Anjuran pemerintah untuk *physical distancing*.
- ▶ Penetapan wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- ▶ Tidak diketahui kapan berakhirnya.



Refocusing Anggaran (Perpres No. 54 Tahun (2020)

Penyesuaian Anggaran SP2020;

- ▶ 4,034 triliun menjadi 1,102 triliun
- ▶ USD 1,03/capita menjadi 0,26/capita

*USD 1 = IDR 14.500,-

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP2020. Kebijakan pemerintah berfokus penanganan pandemi tersebut dengan pembatasan pertemuan tatap muka dan pengalihan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Anggaran SP2020 mengalami pemotongan sebesar 74 persen karena dialihkan untuk pemulihan ekonomi. Semula SP2020 memiliki anggaran atau Rp 4.034,49 miliar, namun pada pelaksanaan SP2020 anggaran tersebut dipotong menjadi sebesar Rp 1.102 miliar. Sehingga, anggaran SP2020 per kapita sebesar USD 0,26 (sebelumnya USD 1,03).

Perubahan Struktur Anggaran pasca Perpres 54/2020 berimplikasi pada:

- ▶ **Penyesuaian Tata Kelola SP2020, dan**
- ▶ **Penyesuaian Output SP2020**

Perubahan struktur anggaran tersebut mendorong BPS melakukan penyesuaian pada setiap tahapan proses bisnis dan output dengan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020.



**BERPENGARUH
TERHADAP
KUALITAS DATA**

SENSUS PENDUDUK 2020 DI MASA PANDEMI

Pandemi Covid-19 menghadapkan semua pihak pada situasi ketidakpastian yang tinggi, namun BPS harus memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan sensus penduduk. Selain Indonesia, sebanyak 13 negara melaksanakan sensus penduduk sesuai jadwal atau menggunakan *sensus register-based*. Sebaliknya, sebanyak 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus.

RENCANA AWAL

PENYESUAIAN

DAMPAK

SENSUS PENDUDUK ONLINE

15 Februari - 31 Maret 2020

15 Februari - **29 Mei 2020**

Jumlah Penduduk Respon di Sumatera Utara 2,13 Juta (15,84%)

PENCACAHAN LAPANGAN

Periode: **Juli 2020**

Wawancara di semua wilayah:

- ◆ CAPI
- ◆ PAPI

Pelatihan petugas tatap muka

Persyaratan dan Kelengkapan petugas:

Rompi, tas, dan ATK

Periode: **September 2020**

Pembagian wilayah di Sumatera Utara menjadi 2 zona:

- Zona 1: (25 kab/kota) Ground Check + Dopu
- Zona 2: (8 kab/kota) Ground Check

Jumlah Petugas: +/- **9.189**

Pelatihan jarak jauh online dan mandiri

Rompi, Tas, & ATK + Alat Pelindung Diri (**masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer dan rapid test**)

Variabel yang dihasilkan di Zona 2 sangat terbatas ► Tantangan pada diseminasi data

Beban petugas bertambah

Pemahaman petugas bervariasi

Realokasi anggaran yang tersedia untuk menjamin terlaksananya SP2020 dengan penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19

Pembagian Zona Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Sumatera Utara



Zona 1
Wilayah DOPU  **[25]**
Kabupaten/ Kota

Probis 5, 6 & 7 dengan DOPU SP2020-C1

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Deli Serdang | 14. Tapanuli Selatan |
| 2. Langkat | 15. Padang Lawas |
| 3. Simalungun | 16. Padang Lawas Utara |
| 4. Asahan | 17. Padangsidimpuan |
| 5. Serdang Bedagai | 18. Toba Samosir |
| 6. Labuhanbatu | 19. Humbang Hasundutan |
| 7. Mandailing Natal | 20. Nias Utara |
| 8. Karo | 21. Nias |
| 9. Labuhanbatu Utara | 22. Samosir |
| 10. Nias Selatan | 23. Gunungsitoli |
| 11. Labuhanbatu Selatan | 24. Nias Barat |
| 12. Tapanuli Utara | 25. Pakpak Bharat |
| 13. Dairi | |

Zona 2
Wilayah non-DOPU  **[8]**
Kabupaten/ Kota

Probis 5 & 6 door to door, tanpa tahap 7

1. Batubara
2. Tapanuli Tengah
3. Sibolga
4. Tebing Tinggi
5. Pematangsiantar
6. Tanjungbalai
7. Medan
8. Binjai

2

Sensus Penduduk Online

SP Online sebagai upaya menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam SP2020

STRATEGI PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK ONLINE

SP Online dirancang untuk memberikan pilihan kepada penduduk Sumatera Utara agar dapat berpartisipasi secara mandiri dalam sensus penduduk. Selain itu, SP Online merupakan salah satu upaya untuk menjangkau penduduk yang sulit ditemui petugas sensus, seperti penduduk yang bekerja dengan jam kerja tertentu, daerah elit, dan lain-lain.

Setelah berlangsung selama hampir 3,5 bulan, pada tanggal 29 Mei 2020 SP Online dinyatakan berakhir dengan hasil yang cukup menggembirakan. Sebanyak 2,13 juta data penduduk atau setara dengan 561,88 ribu keluarga telah terekam dalam SP Online.

Untuk memperoleh capaian tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama di tengah pandemi dan keterbatasan lainnya. Berbagai strategi dilaksanakan oleh BPS Sumatera Utara untuk meningkatkan response rate SP Online, antara lain:

1. melakukan pendekatan kepada Ketua/Pengurus SLS agar menghimbau warga berpartisipasi dalam SP Online;
2. memanfaatkan jejaring di institusi lain (group admin media sosial K/L atau Dinas);
3. meningkatkan koordinasi dan dukungan dengan stakeholder kunci
 - Gubernur: Surat edaran untuk Bupati/walikota
 - Dinas Pendidikan: Surat edaran ke sekolah untuk mendukung kegiatan SP2020
4. merekrut Sahabat Sensus dari perguruan tinggi;
5. melakukan sosialisasi ke OPD/Lembaga/Instansi dan komunitas sosial terkait pelaksanaan SP Online;
6. melakukan pendampingan pengisian (ngibar-ngisi bareng) SP Online pada OPD/Lembaga/Instansi dan komunitas sosial;
7. mengoptimalikan peran seluruh komponen pegawai BPS. Melakukan *re-post* di akun media sosial pribadi pegawai atau mengirim ke *Whatsapp Group* (WAG) yang dimiliki.

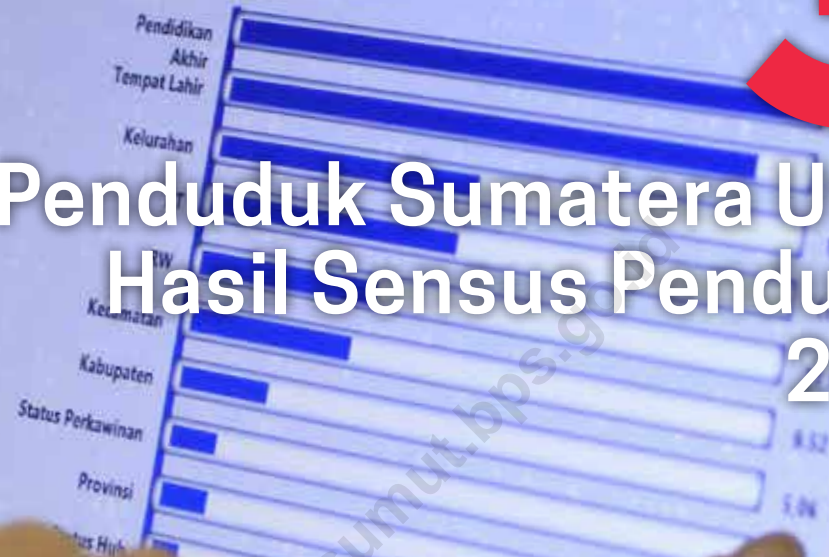


SP Online memberikan keyakinan bahwa sensus penduduk secara mandiri dapat dilakukan di Sumatera Utara di masa yang akan datang. Selanjutnya, SP Online diharapkan tidak hanya digunakan pada SP2020. Kedepannya, SP Online diharapkan dapat digunakan sebagai moda pemutakhiran data kependudukan melalui peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait. Moda ini memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mandiri serta lebih peduli pada data pribadi. Jika catatan peristiwa penting kependudukan dapat diperoleh secara *real time* maka kualitas data kependudukan akan dapat terus ditingkatkan. Sehingga data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan terkini akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran, parameter untuk menentukan kebijakan, dan eksekusi program pembangunan yang lebih baik.

3

Penduduk Sumatera Utara Hasil Sensus Penduduk 2020

Perbandingan Data Hasil
PEMUTAKHIRAN MANDIRI (CAWI)
Data Adminduk
KONSISTEN



JUMLAH
RECORD:
672
RECORDS

Jumlah Penduduk Sumatera Utara pada September 2020 sebanyak 14,80 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen per tahun

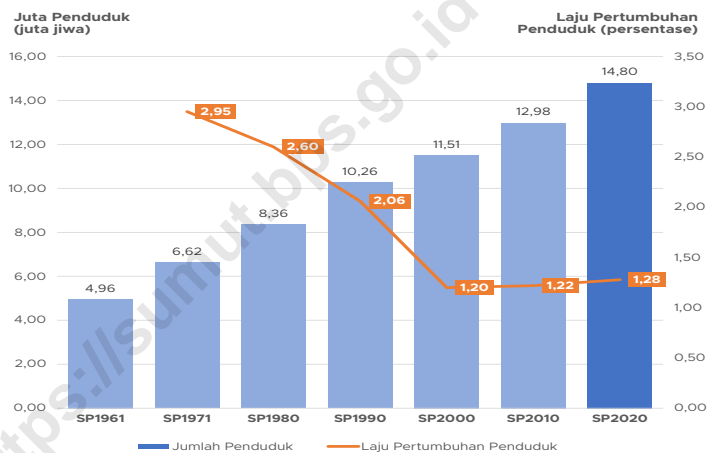
JUMLAH PENDUDUK SUMATERA UTARA

Jumlah penduduk Sumatera Utara sebanyak **14,80 juta jiwa**

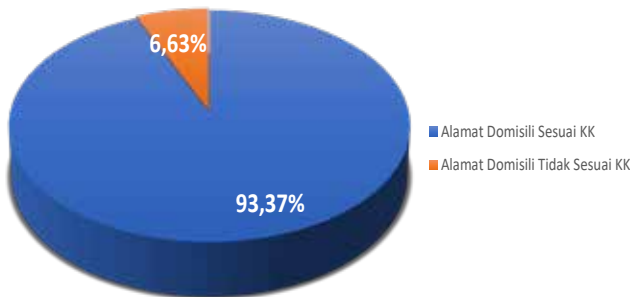
Hasil SP2020 menunjukkan penduduk Sumatera Utara pada bulan September 2020 sebanyak 14,80 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1,82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181,72 ribu jiwa setiap tahun.

Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun. Terdapat percepatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,22 persen.

Jumlah Penduduk Sumatera Utara, 1961-2020



Persentase penduduk berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan KK

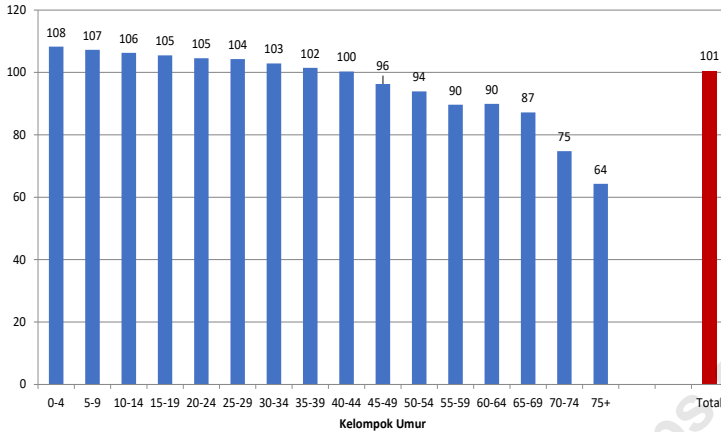


Berdasarkan hasil SP2020 sebesar 93,37 persen atau sekitar 13,82 juta penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK)*). Sementara sebesar 6,63 persen atau sekitar 981,20 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK. Jumlah ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).

*) Perbedaan domisili di level SLS

Laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan

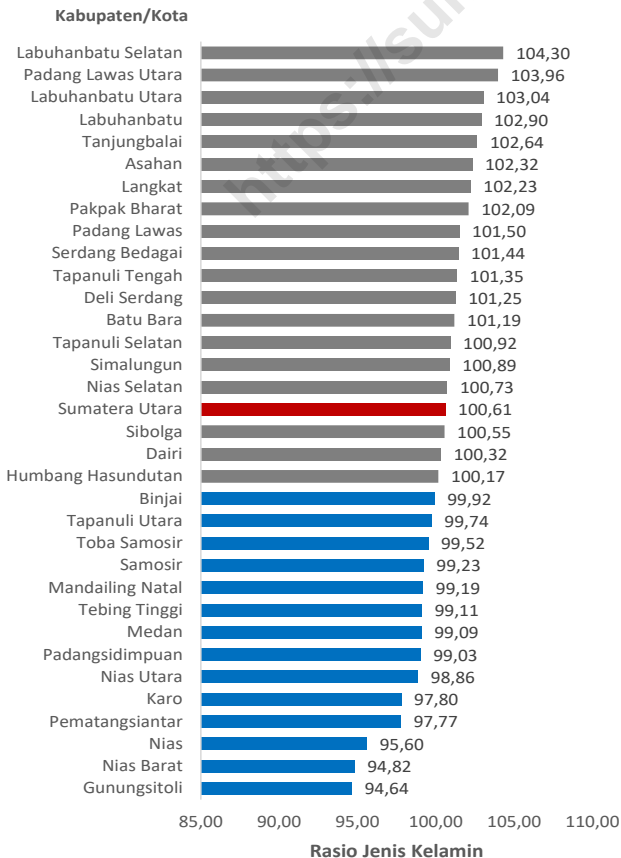
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020



Dari hasil SP2020 diketahui jumlah penduduk laki-laki di Sumatera Utara sebanyak 7,42 juta orang, atau 50,15 persen dari penduduk Sumatera Utara. Sementara, jumlah penduduk perempuan sebanyak 7,38 juta orang, atau 49,85 persen dari penduduk Sumatera Utara. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara sebesar 101, yang artinya terdapat 101 laki-laki per 100 perempuan di Sumatera Utara pada tahun 2020.

Catatan: Variabel umur dalam SP2020 menggunakan data Administrasi Kependudukan

Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2020



Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur. Pada kelompok usia hingga menjelang 40 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Semakin bertambahnya usia menunjukkan tren rasio jenis kelamin yang semakin menurun. Rasio jenis kelamin tertinggi berada pada kelompok usia 0-4 tahun sebesar 108, sedangkan rasio jenis kelamin terendah berada pada kelompok usia 75 keatas. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk lansia laki-laki.

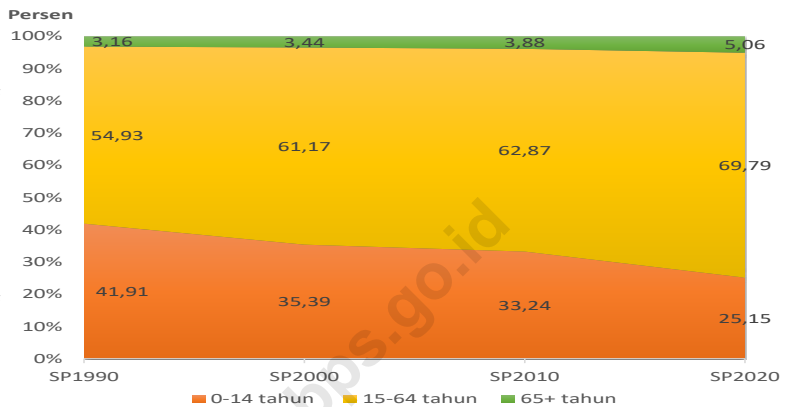
Hasil SP2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Kabupaten/kota tersebut adalah Gunungsitoli, Nias Barat, Nias, Pematangsiantar, Karo, Nias Utara, Padangsidempuan, Medan, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara dan Binjai.

BONUS DEMOGRAFI

Generasi Z bersama Milenial Akan Menjadi Aktor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1990. Pada tahun 1990, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,93 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 69,79 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) semakin terlihat di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Utara berkesempatan untuk berada dalam periode bonus demografi. Jika dimanfaatkan dengan optimal, maka Sumatera Utara dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

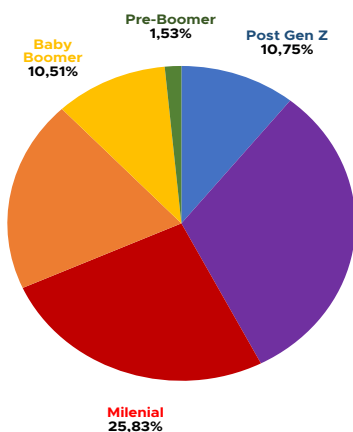
Komposisi penduduk menurut Kelompok Umur, 1990-2020



Catatan: Variabel umur dalam SP2020 menggunakan data Administrasi Kependudukan

Jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar dalam struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Sumatera Utara didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 31,70 persen dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 25,83 persen dari total populasi Sumatera Utara. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Sumatera Utara, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Sumatera Utara.



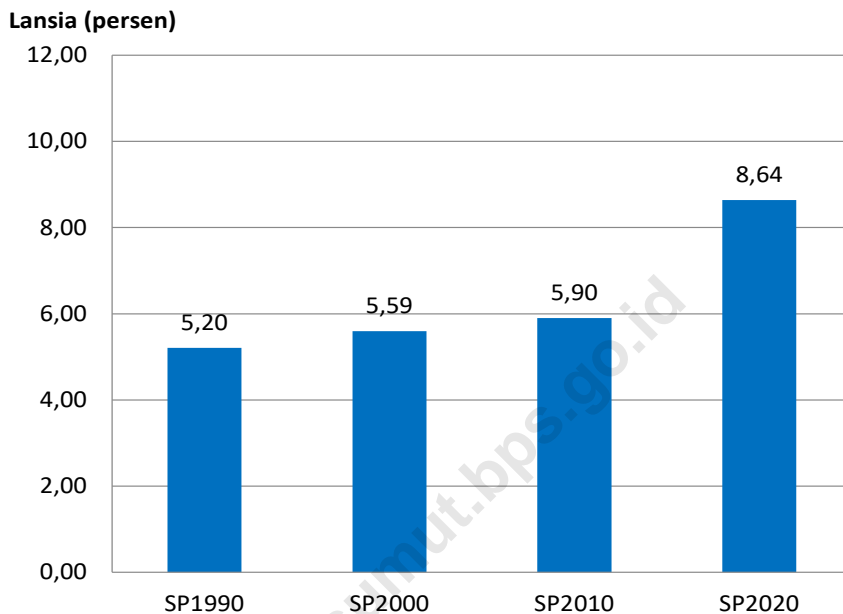
Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020

 <p>Post Generasi Z Lahir tahun 2013 dst Perkiraan usia sekarang s.d. 7 tahun</p>	 <p>Generasi X Lahir tahun 1965-1980 Perkiraan usia sekarang 40-55 tahun</p>
 <p>Generasi Z Lahir tahun 1997-2012 Perkiraan usia sekarang 8-23 tahun</p>	 <p>Baby Boomer Lahir tahun 1946-1964 Perkiraan usia sekarang 56-74 tahun</p>
 <p>Milenial Lahir tahun 1981-1996 Perkiraan usia sekarang 24-39 tahun</p>	 <p>Pre-Boomer Lahir sebelum tahun 1945 Perkiraan usia sekarang 75+ tahun</p>

Sumber pengklasifikasian William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

SUMATERA UTARA MENUJU AGEING POPULATION

Persentase Penduduk Lansia, 1990-2020



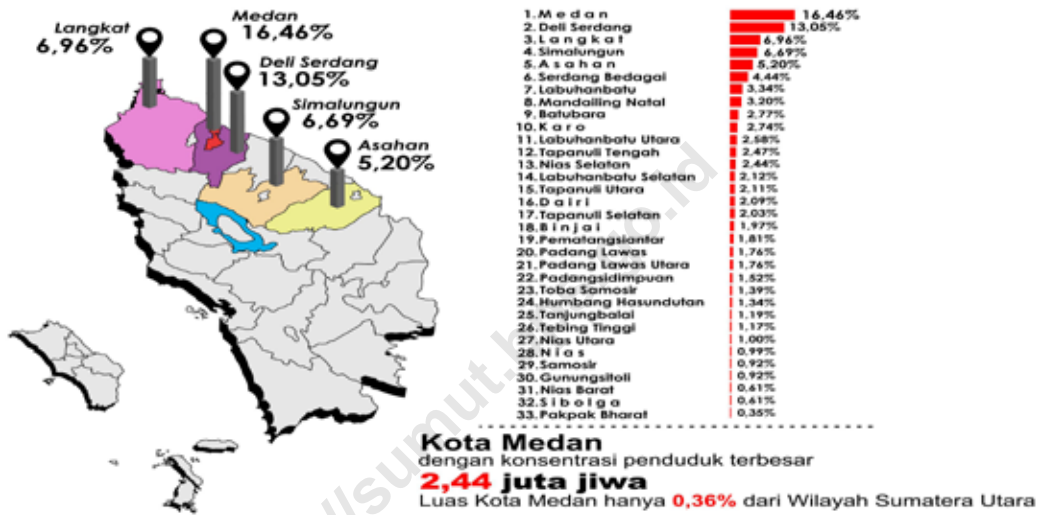
Catatan: Variabel umur dalam SP2020 menggunakan data Administrasi Kependudukan

Pembangunan yang telah dicapai oleh Sumatera Utara selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Sumatera Utara meningkat menjadi 8,64 persen di tahun 2020 dari 5,90 persen pada 2010 berdasarkan hasil SP2010.

Meskipun Sumatera Utara sekarang berada dalam periode jendela kesempatan untuk dapat memetik bonus demografi, tetapi Sumatera Utara harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*. Pemerintah perlu mulai mempersiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi kependudukan di Sumatera Utara tersebut. Jika penduduk lansia tersebut memiliki kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai, serta dapat terus berkontribusi dalam perekonomian, maka kelompok penduduk tersebut berpeluang membuka jendela kesempatan untuk Sumatera Utara memperoleh bonus demografi kedua di masa yang akan datang.

Penduduk Sumatera Utara masih terkonsentrasi di Kota Medan

Sebaran Penduduk Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota



Dengan luas daratan Provinsi Sumatera Utara sebesar 72,98 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara sebanyak 203 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencatat kepadatan penduduk Sumatera Utara sebanyak 178 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2000 yang mencapai 160 jiwa per kilometer persegi.

Sebaran penduduk Sumatera Utara masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografis hanya sebesar 0,36 persen wilayah Sumatera Utara, namun Kota Medan dihuni oleh 2,44 juta penduduk atau 16,46 persen penduduk Sumatera Utara. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk sebanyak 1,93 juta orang atau sebesar 13,05 persen. Sementara Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 6,96 persen, 6,69 persen dan 5,20 persen. Adapun kabupaten/kota lainnya masing masing dibawah 5 persen.



LONG FORM

- Sebagai rangkaian pelaksanaan SP2020, di tahun 2021 akan dilanjutkan dengan pendataan *long form* secara sampel.
- Pendataan ini akan dilaksanakan pada September 2021.
- Tujuan dari pendataan *long form* ini adalah untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya untuk menghasilkan indikator SDG's dan RPJMN khususnya bidang kependudukan.



TABEL-TABEL

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	71 686	74 986	146 672
Mandailing Natal	235 478	237 408	472 886
Tapanuli Selatan	151 148	149 763	300 911
Tapanuli Tengah	183 814	181 363	365 177
Tapanuli Utara	156 176	156 582	312 758
Toba Samosir	102 850	103 349	206 199
Labuhanbatu	250 481	243 418	493 899
Asahan	389 391	380 569	769 960
Simalungun	497 314	492 932	990 246
Dairi	154 628	154 136	308 764
Karo	200 247	204 751	404 998
Deli Serdang	971 735	959 706	1 931 441
Langkat	520 784	509 418	1 030 202
Nias Selatan	180 917	179 614	360 531
Humbang Hasundutan	98 958	98 793	197 751
Pakpak Bharat	26 446	25 905	52 351
Samosir	67 957	68 484	136 441
Serdang Bedagai	331 101	326 389	657 490
Batu Bara	206 551	204 127	410 678
Padang Lawas Utara	132 893	127 827	260 720
Padang Lawas	131 476	129 535	261 011
Labuhanbatu Selatan	160 356	153 738	314 094
Labuhanbatu Utara	193 854	188 140	381 994
Nias Utara	73 216	74 058	147 274
Nias Barat	43 800	46 194	89 994
Sibolga	44 915	44 669	89 584
Tanjungbalai	89 159	86 868	176 027
Pematangsiantar	132 615	135 639	268 254
Tebing Tinggi	86 032	86 806	172 838
Medan	1 212 069	1 223 183	2 435 252
Binjai	145 859	145 983	291 842
Padangsidempuan	112 004	113 101	225 105
Gunungsitoli	66 136	69 881	136 017
SUMATERA UTARA	7 422 046	7 377 315	14 799 361

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Kesesuaian Alamat Domisili dengan KK, 2020 (jiwa)

Provinsi	Alamat Domisili Sesuai KK	Alamat Domisili Tidak Sesuai KK	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	136 628	10 044	146 672
Mandailing Natal	458 423	14 463	472 886
Tapanuli Selatan	292 307	8 604	300 911
Tapanuli Tengah	317 917	47 260	365 177
Tapanuli Utara	299 870	12 888	312 758
Toba Samosir	194 223	11 976	206 199
Labuhanbatu	461 409	32 490	493 899
Asahan	735 153	34 807	769 960
Simalungun	952 645	37 601	990 246
Dairi	295 511	13 253	308 764
Karo	382 592	22 406	404 998
Deli Serdang	1 804 440	127 001	1 931 441
Langkat	971 551	58 651	1 030 202
Nias Selatan	351 241	9 290	360 531
Humbang Hasundutan	186 891	10 860	197 751
Pakpak Bharat	47 362	4 989	52 351
Samosir	131 799	4 642	136 441
Serdang Bedagai	621 465	36 025	657 490
Batu Bara	378 557	32 121	410 678
Padang Lawas Utara	248 282	12 438	260 720
Padang Lawas	234 941	26 070	261 011
Labuhanbatu Selatan	283 004	31 090	314 094
Labuhanbatu Utara	367 858	14 136	381 994
Nias Utara	140 640	6 634	147 274
Nias Barat	85 748	4 246	89 994
Sibolga	72 520	17 064	89 584
Tanjungbalai	150 387	25 640	176 027
Pematangsiantar	236 989	31 265	268 254
Tebing Tinggi	154 614	18 224	172 838
Medan	2 230 179	205 073	2 435 252
Binjai	262 684	29 158	291 842
Padangsidempuan	206 299	18 806	225 105
Gunungsitoli	124 030	11 987	136 017
SUMATERA UTARA	13 818 159	981 202	14 799 361

Jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	1 909 837	1 783 977	3 693 814
15-64	5 132 810	5 117 856	10 250 666
65+	322 613	420 663	743 276
Tidak Tahu/TT	56 786	54 819	111 605
JUMLAH	7 422 046	7 377 315	14 799 361

Catatan: Variabel umur dalam SP2020 menggunakan data Administrasi Kependudukan

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
CAPI	: <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i>
CAWI	: <i>Computer Aided Web Interviewing</i>
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease</i>
Ditjen Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DOPU	: <i>Drop Off and Pick Up</i>
DP	: Daftar Penduduk
K/L	: Kementerian/Lembaga
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAPI	: <i>Paper and Pencil Interviewing</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNSD	: <i>United Nations Statistics Division</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
Perpres	: Peraturan Presiden Republik Indonesia
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-undang
WAG	: Whatsapp Group
Wilkerstat	: Wilayah Kerja Statistik
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

